

### **BAB III**

## **RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH**

Kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah yang meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

### **3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH**

#### **3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2011 dan Perkiraan Tahun 2012**

##### **1. Kondisi Ekonomi Global**

Sampai dengan awal tahun 2012, kondisi ekonomi global belum membaik dengan krisis utang Eropa yang masih rentan dan perlambatan ekonomi negara-negara maju dan *emerging market*. Krisis yang dialami negara-negara Eropa terkait utang dan defisit fiskal masih belum teratasi sehingga meningkatkan ketidakpastian, sementara pemulihan ekonomi AS masih rentan. Perdagangan global yang menurun berdampak pada penurunan ekonomi negara-negara *emerging market*. Sejalan dengan aktivitas ekonomi global yang melemah, harga komoditas global non-energi cenderung menurun, yang mendorong penurunan tekanan inflasi global.

Dalam keseluruhan tahun 2011, perekonomian dunia tumbuh sebesar 3,9% lebih rendah dari tahun 2010 yang besarnya 5,3%. Perlambatan ekonomi dunia pada tahun 2011 terutama disebabkan oleh (a) lambatnya proses pemulihan ekonomi AS; (b) berlanjutnya krisis keuangan Eropa dengan kekhawatiran penularan negara Eropa lainnya maupun global; serta (c) menurunnya kemampuan negara-negara Asia sebagai penopang ekonomi dunia.

Pada tahun 2011, ekonomi AS tumbuh sebesar 1,7% lebih rendah dari tahun 2010 yang besarnya 3,0%. Perekonomian kawasan Eropa tumbuh 1,4%, lebih lambat dari tahun 2010 yang tumbuh sebesar 1,9%. Pada tahun 2011, Jerman dan Perancis sebagai penopang utama kawasan Eropa tumbuh masing-masing 3,1% dan 1,7% lebih lambat dan lebih tinggi dari tahun 2010 yang masing-masing sebesar 3,6% dan

1,4%. Kondisi fiskal Yunani, Portugal, dan Italia yang semakin berat menekan perekonomian ketiga negara tersebut dari tumbuh masing-masing -3,5%, 1,4% dan 1,8%, menjadi -6,9%, -1,5%, dan 0,4%. Sedangkan perekonomian Spanyol tumbuh sebesar 0,7% pada tahun 2011 setelah pada tahun sebelumnya menurun sebesar 0,1%. Upaya untuk meningkatkan ketahanan fiskal di Kawasan Eropa diperkirakan membutuhkan waktu lama dan akan dicermati mengingat potensinya cukup membahayakan bagi stabilitas keuangan global. Negara penopang utama kawasan Asia, Cina dan India, pada tahun 2011 masing-masing tumbuh sebesar 9,2% dan 7,2%, lebih lambat dari Tahun 2010 yang masing-masing tumbuh 10,4% dan 10,6%. Sedangkan pada tahun 2011 perekonomian Jepang menurun sebesar 0,7%, paska tsunami Maret 2011, setelah tumbuh sebesar 4,4% pada tahun 2010.

Harga komoditi dunia tetap tinggi pada tahun 2011, walaupun komoditi non-energi cenderung menurun pada akhir tahun yang didorong oleh penurunan permintaan negara-negara maju. Perubahan iklim global yang tidak menentu serta ketegangan politik Timur Tengah dan Iran mendorong harga komoditi terutama komoditi energi tetap tinggi pada tahun 2011. Indeks harga komoditi non-energi yang meningkat sejak pertengahan Tahun 2010 menurun pada akhir tahun 2011 hingga Januari 2012. Pada bulan April 2012, indeks harga komoditi non-energi turun 12,6% (y-o-y) dengan adanya penurunan pada harga komoditi pangan dan komoditi bahan baku industri. Sementara itu, keterbatasan suplai minyak mentah yang disebabkan ketegangan politik Timur Tengah dan Iran mendorong harga minyak mentah tetap tinggi hingga awal tahun 2012. Harga rata-rata minyak mentah (Brent, Dubai, dan WTI) per bulan pada tahun 2011 mencapai USD104,0 per barel dan mencapai USD113,7 per barel pada April 2012.

Seiring dengan penurunan harga komoditi dunia terutama komoditi non-energi serta perlambatan ekonomi dunia, inflasi menurun pada beberapa negara dunia. Laju inflasi Cina menurun dari 6,5% (y-o-y) pada bulan Juli 2011 menjadi 4,1% (y-o-y) pada bulan Desember 2011. Demikian juga pada negara-negara lainnya, termasuk negara maju. Pada keseluruhan tahun 2011, laju inflasi di Kawasan Eropa mencapai 2,7%, sedangkan Jepang mengalami deflasi sebesar 0,3%.

Perlambatan ekonomi dunia serta ketidakpastian penyelesaian krisis keuangan Eropa mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan global pada tahun 2011. Indeks perdagangan saham baik di Eropa maupun Asia menurun pada akhir tahun 2011 dibandingkan akhir Tahun 2010. Pada akhir tahun 2011, indeks perdagangan saham di London, Tokyo, Singapura, Malaysia, Hongkong masing-masing mencapai 5.639, 8.455, 2.773, 1.489, 18.343 lebih rendah dari akhir tahun 2010 yang masing-masing mencapai 5.900, 10.229, 3.190, 1.519, dan 23.035. Namun demikian, sejak awal Tahun 2012, kepercayaan terhadap sistem keuangan baik di AS, Eropa maupun Asia membaik seiring dengan keputusan pemberian dana bailout sebesar 130 triliun Euro kepada Yunani pada awal tahun 2012. Pada tanggal 2 Mei 2012, indeks Nikkei Tokyo, Hangseng Hongkong, STI Singapura, dan Malaysia, mencapai 9.380, 21.309, 3.006, dan 1.582. Sedangkan indeks FTSE 100 London serta DJIA New York masing-masing mencapai 5.758, dan 13.115.

Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2012 diperkirakan melambat menjadi 3,5% (IMF, *World Economic Outlook*, April 2012) disebabkan oleh proses pemulihan AS yang rentan, keberlanjutan krisis keuangan Eropa, serta kemampuan ekonomi Asia yang menurun.

## **2. Kondisi Ekonomi Nasional**

Kondisi ekonomi nasional tahun 2011 dan perkiraannya pada tahun 2012 lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kemajuan tersebut antara lain ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan stabilitas yang terjaga.

Perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 6,5% pada tahun 2011 lebih tinggi dari tahun 2010 (6,2%). Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2011 terutama ditopang oleh ketahanan domestik berupa investasi yang meningkat dan daya beli masyarakat yang terjaga serta ekspor barang dan jasa yang tetap tumbuh.

Pada tahun 2011, investasi berupa Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), konsumsi masyarakat dan ekspor barang dan jasa meningkat masing-masing sebesar 8,8%, 4,7%, dan 13,6%. Pada tahun 2012, perekonomian Indonesia diperkirakan tumbuh sebesar 6,5% didukung

oleh permintaan domestik yang lebih baik dengan resiko eksternal dan tingginya harga energi.

Stabilitas ekonomi Indonesia pada tahun 2011 masih terjaga dalam menghadapi tekanan berat ekonomi dunia berupa melambatnya perekonomian dunia, berlanjutnya krisis keuangan Eropa, gangguan cuaca dan iklim, serta ketegangan politik di Timur Tengah dan Iran.

Pada tahun 2011, rata-rata harian nilai tukar Rupiah mencapai Rp 8.779 per dolar AS atau menguat 3,4% dibandingkan rata-rata tahun sebelumnya. Cadangan devisa mencapai USD 110,1 miliar, bertambah USD 13,9 miliar dibandingkan tahun 2010. Laju inflasi pada tahun 2011 terkendali pada 3,8%, jauh lebih rendah dibanding tahun sebelumnya (7,0%). Pada tahun 2012 dengan beberapa risiko eksternal seperti masih rentannya krisis utang Eropa; ketegangan politik Timur Tengah dan Iran; serta ketidakpastian cuaca dan iklim, stabilitas ekonomi nasional diperkirakan tetap terjaga.

Momentum pertumbuhan dan terjaganya stabilitas ekonomi mendorong peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi. Hal ini dicerminkan oleh menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran. Pada bulan September 2011, jumlah penduduk miskin menurun menjadi 29,9 juta orang (12,4%) atau berkurang sebesar 130 ribu orang dibandingkan Maret 2011. Jumlah pengangguran terbuka menurun menjadi 7,6 juta orang (6,3%) atau berkurang sebesar 510 ribu orang dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2012, kualitas pertumbuhan diupayakan lebih baik dari tahun sebelumnya.

### **3. Kondisi Ekonomi Provinsi Banten**

Kerangka ekonomi daerah Tahun 2013 tidak dapat dilepaskan dari arah kebijakan dan perkembangan berbagai kinerja ekonomi makro tahun berjalan 2012, dan prospeknya dalam tahun 2013, yang sangat dipengaruhi oleh kebijakan dan kinerja makro ekonomi daerah tahun-tahun sebelumnya.

Dari hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah, dapat dikatakan bahwa kondisi perekonomian Provinsi Banten telah mampu menunjukkan peningkatan dilihat dari capaian indikator ekonomi makro, seperti Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Perkembangan Kinerja Sektor, Pendapatan

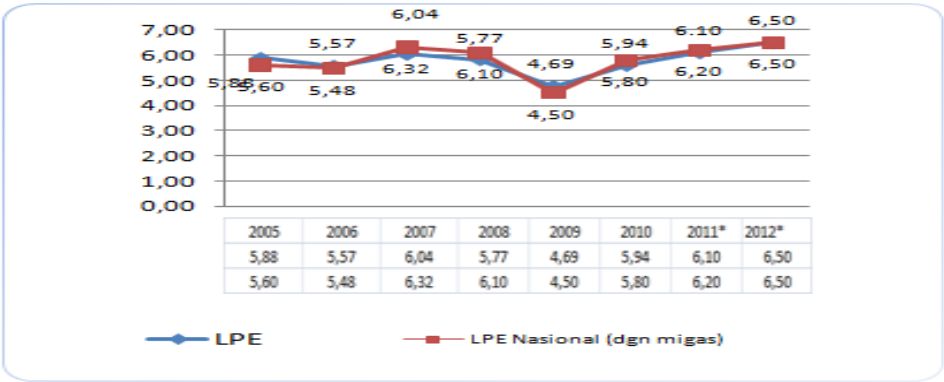
Per Kapita, Nilai dan Laju Inflasi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Struktur Investasi Daerah.

**a. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)**

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) merupakan indikator kemajuan perekonomian daerah. Pada tahun 2002, LPE Banten (4,11%) masih berada di bawah LPE Nasional (4,5%), namun mulai tahun 2003-2011 seiring dengan percepatan pembangunan di Provinsi Banten, terutama pada sektor jasa perdagangan (sektor tersier) dan sektor industri (sektor sekunder) LPE Banten rata – rata sudah mulai berada di atas LPE Nasional. Pada sektor pertanian (sektor primer) masih belum memberikan sumbangan yang signifikan, terutama disebabkan karena output di sektor ini lebih banyak dinyatakan sebagai input pada sektor industri.

Pada periode tahun 2008-2010, seiring dengan adanya rasionalisasi perhitungan LPE (sejak tahun 2006) dengan tahun dasar 2000, LPE Banten dirasionalkan berada di atas LPE Nasional, dan angka sementara LPE Banten di tahun 2012 di prediksi Bank Indonesia Serang diperkirakan melambat sebesar 6,24% lebih rendah dari yang ditargetkan sebesar 6,50-6,80%, dalam RPJMD 2007-2012. Hal ini disebabkan belum pulihnya krisis ekonomi negara-negara Eropa, yang selama ini merupakan pasar ekspor barang-barang dari Indonesia khususnya Provinsi Banten.Selain itu tingginya harga minyak mentah dunia yang berimbas pada produksi sektor riil yang ada di wilayah Provinsi Banten.Perkembangan LPE Banten dan LPE Nasional (dengan Migas) Tahun 2006-2013 dan Target tahun 2012 terlihat sebagaimanaGambar 3.1.

**Gambar 3.1**  
**Grafik Perkembangan LPE Banten dan LPE Nasional**  
**(denganMigas)**  
**Tahun 2006– 2011 dan Target Tahun 2012**



Sumber: Banten Dalam Angka, BPS 2011

Diharapkan seiring dengan pemulihan dampak krisis keuangan global, yang juga berdampak pada kapasitas produksi perusahaan-perusahaan besar di Banten, maka LPE pada tahun 2013 diperkirakan akan mengalami kecenderungan positif yaitu sebesar 6,50%. Disamping itu, pertumbuhan perekonomian di Banten juga akan diiringi oleh tingginya pertumbuhan jumlah penduduk (terutama akibat migrasi masuk ke kota) dan peningkatan jumlah angkatan kerja. Data tentang tenaga kerja dan pengangguran di Provinsi Banten sampai dengan bulan Agustus tahun 2011 ditunjukkan sebagaimana Tabel 3.1.

**Tabel 3.1**  
**Data Tenaga Kerja dan Pengangguran**  
**di Provinsi Banten s.d Bulan Agustus Tahun 2011**

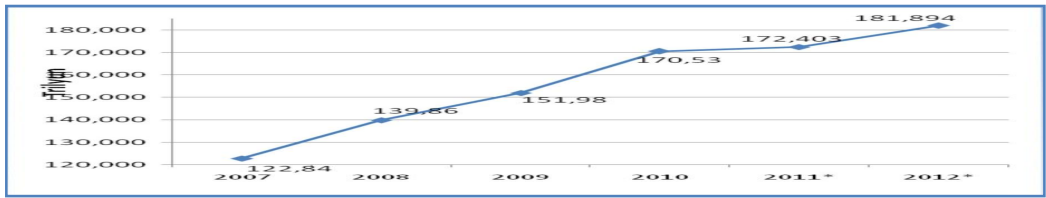
| NO        | KAB/KOTA          | ANGKATAN<br>KERJA | PENGGANGGURAN | TPT<br>(%) | TPAK<br>(%) |
|-----------|-------------------|-------------------|---------------|------------|-------------|
| Kabupaten |                   |                   |               |            |             |
| 1         | Kab. Pandeglang   | 513.487           | 58.108        | 11.32      | 64.28       |
| 2         | Kab. Lebak        | 549.378           | 66.471        | 12,10      | 63.60       |
| 3         | Kab<br>Tangerang  | 1.416,780         | 204,358       | 14,42      | 69.46       |
| 4.        | Kab. Serang       | 657,679           | 87.433        | 13.29      | 64.74       |
| Kota      |                   |                   |               |            |             |
| 5         | Kota<br>Tangerang | 945.334           | 121.818       | 12.89      | 70.31       |
| 6         | Kota Cilegon      | 185.874           | 24.426        | 13.14      | 70.00       |
| 7         | Kota Serang       | 274.594           | 38.015        | 13.84      | 68.60       |
| 8         | Kota Tangsel      | 667.099           | 79.935        | 11.98      | 69.64       |
| JUMLAH    |                   | 5.210.224         | 680.564       | 13.06      | 67.79       |

Sumber: Banten Dalam Angka, BPS 2011

**b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Angka PDRB Provinsi Banten terus mengalami peningkatan dari tahun 2010-2011 sebesar 171.690,41 – 192.218,91 triliyun.Hal ini berdampak terhadap meningkatnya daya beli masyarakat, terbukanya kesempatan kerja, berkurangnya jumlah penduduk miskin, membaiknya ketahanan pangan masyarakat serta meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan perkapita. Perkembangan nilai PDRB Banten harga berlaku tahun dasar 2000 tahun 2007-2011 dan prediksi tahun 2012 terlihat sebagaimana Gambar 3.2.

**Gambar 3.2**  
**Perkembangan Nilai PDRB Banten Harga Berlaku Tahun Dasar 2000 (Rp. Jt) Tahun 2007-2011 dan Prediksi Tahun 2012**

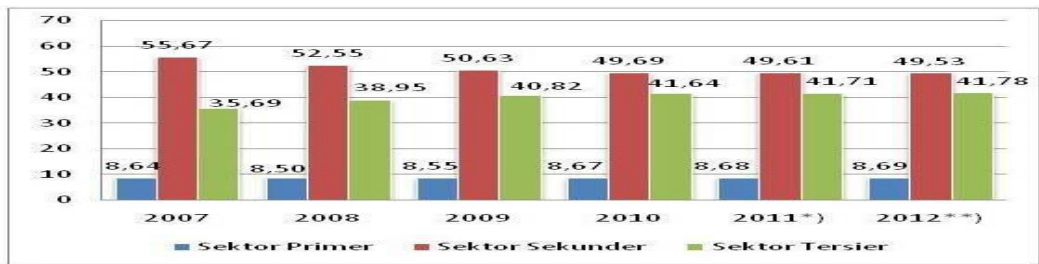


Sumber: Banten Dalam Angka, BPS 2011

**c. Kinerja Sektor Perekonomian Daerah**

Pertumbuhan PDRB merupakan sumbangan dari berbagai sektor usaha. Sektor usaha sekunder (industri manufaktur, bangunan, listrik, dan air bersih) merupakan sektor usaha yang memberikan sumbangan terbesar bagi perekonomian Banten dengan rata-rata sebesar 54,80% selama tahun 2011. Kemudian sektor tersier (transportasi, keuangan dan jasa-jasa) memberikan sumbangan rata-rata sebesar 37,14%. Sementara sektor primer (pertanian dan pertambangan) hanya menyumbang rata-rata sebesar 8,06%. Hal ini mengindikasikan bahwa perekonomian daerah Banten telah menuju pada industrialisasi dan belum terjadinya pemerataan pembangunan, karena pada kenyataannya sebagian besar penduduk masih tergantung kehidupannya pada sektor pertanian (pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan).Kontribusi sector PDRB harga berlaku (Rp. Juta) dalam struktur perekonomian Provinsi Banten untuk capaian tahun 2007-2011 dan prediksi tahun 2012 terlihat sebagaimana Gambar 3.3.

**Gambar 3.3**  
**Grafik Kontribusi Sektor PDRB Harga Berlaku (Rp. Juta) dalam Struktur Perekonomian Provinsi Banten (Capaian Tahun 2007-2011 dan Prediksi Tahun 2012)**



Sumber: Banten Dalam Angka, BPS 2011

1) Industri

Industri merupakan sektor pendukung utama kegiatan pembangunan ekonomi daerah.Perkembangan bidang industri yang meliputi industri kecil, menengah dan industri besar, yang

keberadaannya dari tahun ke tahun terus cenderung meningkat. Seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi nasional, iklim usaha saat ini dirasakan membaik. Perekonomian di Banten menunjukkan nilai positif dengan kenaikan 8,52% pada industri makanan, minuman dan tembakau, sementara 11,20% pada industri tekstil barang kulit dan alas kaki.

Pada umumnya kegiatan industri berada di wilayah Banten bagian Utara, dimana secara umum, ada sekitar 98,05% kegiatan industri terletak di Wilayah Banten Utara. Dengan nilai tambah industri pada tahun 2009-2011 yang dihasilkan rata-rata sebesar Rp. 5,7 triliun per tahun diharapkan target LPE Provinsi Banten bisa tercapai.

## 2) Pertanian

Sektor pertanian yang terdiri dari tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan dan kelautan, merupakan sektor primer dalam struktur perekonomian daerah. Selama tahun 2008 sampai dengan 2011 sektor ini rata-rata memberikan kontribusi sebesar 8,67%. Sektor pertanian telah memperlihatkan kemajuan yang nyata, khususnya padi, dimana produksi dan produktifitasnya terus meningkat. Hal ini terbukti bahwa pada tahun 2010, surplus produksi padi 10%, Gubernur mendapat penghargaan Satya Lencana Wirakarya dari Presiden RI. Demikian pula komoditas lainnya seperti jagung, kedelai, buah-buahan, kelapa, gula aren, kakao, ternak unggas, perikanan tangkap dan budidaya cenderung berfluktuasi. dikarenakan keadaan cuaca yang tidak menentu.

Nilai Tukar Petani (NTP) di Provinsi Banten mengalami peningkatan dari semula pada tahun 2009 sebesar 99,67% meningkat menjadi 103,71% pada tahun 2010 dan pada tahun 2011 NTP mencapai 106%.

Subsektor pertanian tanaman pangan adalah penunjang terbesar dalam struktur perekonomian. Kontribusinya sebesar 5,26% terhadap PDRB dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 16,54% per tahun. Sub sektor peternakan memberikan kontribusi sebesar 1,73% terhadap PDRB, sedangkan subsektor perikanan hanya memberikan kontribusi rata-rata sebesar 0,56%



per tahun. Penyumbang terkecil dari sektor pertanian adalah subsektor perkebunan yang hanya memberikan kontribusi rata-rata sebesar 0,71% per tahun. Pola pengelolaan perkebunan ini terbagi ke dalam tiga kategori yaitu (a) perkebunan besar negara seluas 11.618 ha, (b) perkebunan besar swasta 9.818 ha dan (c) perkebunan rakyat seluas 162.218 ha. Subsektor kehutanan dalam struktur perekonomian daerah memberikan kontribusi sebesar 0,04% dengan laju pertumbuhan yang cenderung menurun rata-rata sebesar 2,06% per tahun.

Berdasarkan pada kondisi tersebut diatas dapat disimpulkan beberapa permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam rangka pembangunan pertanian yaitu (a) masih rendahnya produktifitas, (b) lahan pengusahaan yang semakin sempit, (c) akses petani dan nelayan ke sumberdaya produktif seperti permodalan dan layanan usaha sangat terbatas dan (d) faktor cuaca ekstrim.

### 3) Perdagangan, Transportasi, keuangan dan jasa-jasa

Sektor perdagangan yang terdiri dari usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKM-K) yang berbasis pertanian, pertambangan dan galian, industri serta barang ekspor-impor berkembang seiring dengan meningkatnya pembangunan di Provinsi Banten. Selama kurun waktu 2007-2011, sektor perdagangan mengalami perkembangan yang baik dengan kecenderungan meningkat rata-rata 1,78% per tahun dalam memberikan sumbangan terhadap PDRB.

Beberapa permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pengembangan UMKM-K ini adalah (a) keterkaitan sektor hulu-hilir antara wilayah utara dan selatan, (b) kesenjangan nilai tambah, (c) rendahnya produktifitas UMKM-K, (d) terbatasnya akses UMKM-K dan (e) rendahnya kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi.

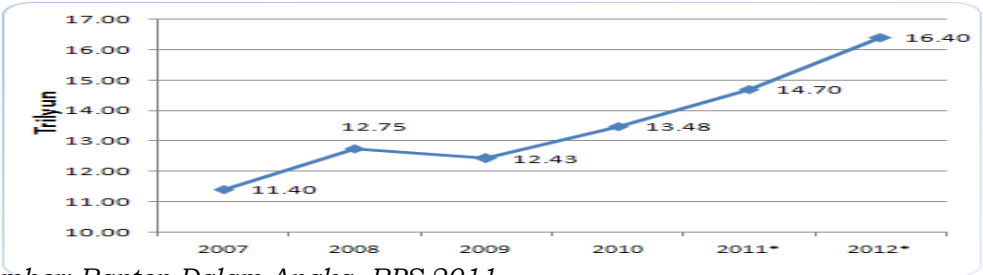
#### **d. Pendapatan per-kapita (PDRB per kapita)**

Pendapatan per kapita masyarakat Banten sejak tahun 2008-2010 meningkat searah dengan laju pertumbuhan ekonomi. PDRB per kapita masyarakat Banten tahun 2008 sebesar Rp. 12,75 juta, tahun 2009 sebesar Rp. 12,43 juta, dan pada tahun 2009 sebesar Rp. 13,48 juta per tahun. Diperkirakan meningkat menjadi Rp.

14,70 Juta per orang per tahun pada tahun 2011. Jika dibandingkan dengan angka inflasi selama tahun 2003-2011 rata-rata sebesar 6%, maka masih terdapat kenaikan PDRB mutlak sebesar 2%.Hal ini berarti masih ada peningkatan kemakmuran masyarakat Banten.

Perkembangan nilai PDRB per kapita tahun 2008-2011 dan perkiraan tahun 2012 terlihat sebagaimana Gambar 3.4.

**Gambar 3.4**  
**Grafik Perkembangan Nilai PDRB Per Kapita (Rp. Juta)**  
**Tahun 2008-2011 dan Target Tahun 2012**

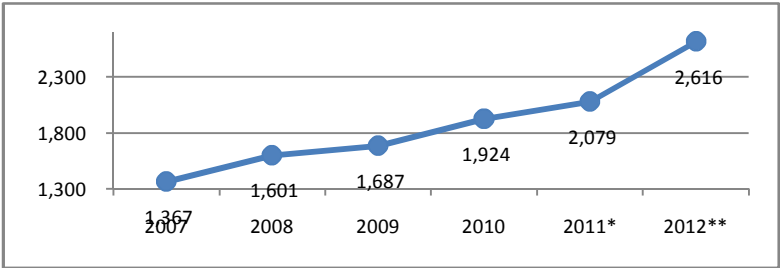


Sumber: Banten Dalam Angka, BPS 2011

**e. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah Provinsi Banten merupakan indikator untuk mengukur tingkat kemandirian dan kemajuan ekonomi daerah serta keberhasilan daerah dalam menggali potensi pendapatan. Pada tahun 2003 penerimaan PAD sebesar Rp. 437,4 milyar, setiap tahunnya terus meningkat dan pada tahun 2008 mencapai Rp. 1,601 trilyun, tahun 2009 mencapai Rp. 1,687 trilyun, tahun 2010 mencapai Rp. 1,924 trilyun, tahun 2011 mencapai Rp. 2,079 trilyun, pada Tahun 2012 ditargetkan sebesar 2,450 trilyun dan pada Tahun 2013 PAD Banten direncanakan mencapai 3,12 trilyun. Perkembangan PAD Banten tahun 2008-2011 dan target tahun 2012 terlihat sebagaimana Gambar 3.5.

**Gambar 3.5**  
**Grafik Perkembangan PAD Banten (Rp. Trilyun)**  
**Tahun 2008-2011 dan Target Tahun 2012**



Sumber: DPKAD Provinsi Banten 2012

**f. Struktur Investasi Daerah**

Optimisme pelaku usaha terkait investasi di Banten semakin meningkat seiring meningkatnya potensi konsumsi domestik/nasional dan perkiraan pencapaian status investment grade bagi Indonesia pada periode yang akan datang. Kinerja investasi diperkirakan meningkat tercermin dari meningkatnya angka pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto pada komponen PDRB Banten dari 8,74% pada triwulan III 20011 menjadi 11,90% pada periode laporan. Tingginya investasi pada periode laporan diperkirakan bersumber dari ekspansi bisnis pada sektor industri pengolahan, pengangkutan, perdagangan, hotel dan restoran serta konstruksi.

Menurut data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI tahun 2012, tercatat Penanaman Modal Asing (PMA) di wilayah Banten pada tahun 2011 jauh melebihi Tahun 2010. Jumlah realisasi PMA pada tahun 2011 mencapai 418 proyek dengan nilai investasi sebesar USD 2,17 miliar, sementara itu Tahun 2010 hanya sebanyak 280 proyek dengan nilai USD 1,54 miliar atau terdapat peningkatan sebanyak 138 proyek atau senilai USD 0,63 miliar. Di sisi lain, realisasi investasi dalam negeri di Banten mengalami penurunan dari sebanyak 76 proyek pada tahun 2010 (Rp 5,85 triliun) menjadi sebanyak 38 proyek (senilai Rp 4,10 triliun). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa investor yang berminat di Wilayah Banten cenderung berasal dari investor luar negeri. Perkembangan dan peringkat investasi di Provinsi Banten tahun 2006-2011 terlihat sebagaimana Tabel 3.2.

**Tabel 3.2**  
**Perkembangan dan Peringkat Investasi Provinsi Banten**  
**Tahun 2006 - 2011**

| PERKEMBANGAN REALISASI INVESTASI<br>PMDN DAN PMA TAHUN 2006 – 2011<br>DI PROVINSI BANTEN |        |                                       |        |                                 | <br>BKPM<br>Indonesia Investment<br>Coordinating Board |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|--------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tahun                                                                                    | PMDN   |                                       | PMA    |                                 |                                                                                                                                             |
|                                                                                          | Proyek | Investasi<br>(dalam milyar<br>rupiah) | Proyek | Investasi<br>(dalam US\$. Juta) | Total Investasi<br>PMA & PMDN<br>Investasi (dalam<br>rupiah)                                                                                |
| 2006                                                                                     | 19     | 3.815,2                               | 84     | 508,2                           | 4.679.255.200.000                                                                                                                           |
| 2007                                                                                     | 22     | 1.068,7                               | 78     | 708,6                           | 7.825.050.000.000                                                                                                                           |
| 2008                                                                                     | 31     | 1.989,1                               | 99     | 477,8                           | 6.788.306.105.417                                                                                                                           |
| 2009                                                                                     | 23     | 4.381,7                               | 92     | 1.412,0                         | 19.099.114.628.798                                                                                                                          |
| 2010                                                                                     | 76     | 5.852,5                               | 280    | 1.544,2                         | 19.710.000.000.000                                                                                                                          |
| 2011                                                                                     | 32     | 5.979,4                               | 71     | 1.021,6                         | 15.174.362.066.230                                                                                                                          |

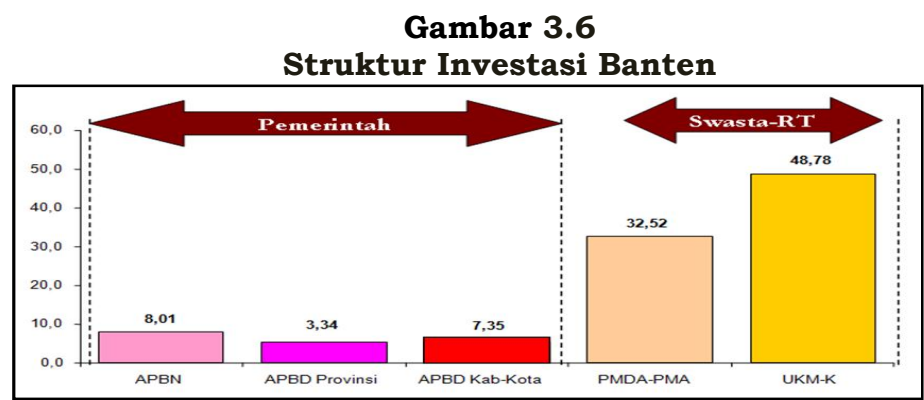
Sumber: Data Perkembangan Penanaman Modal Edisi Desember 2011, BKPM RI  
 Catatan : (Asumsi nilai tukar USD mengikuti ketentuan BI pada masa tahun laporan)

Peningkatan investasi tercermin pula dari meningkatnya

penggunaan semen di Banten terutama untuk konstruksi usaha manufaktur, bangunan dan infrastruktur. Penggunaan/konsumsi semen di wilayah Banten yang terus meningkat dan tumbuh lebih dari 40% (yoy), bahkan pertumbuhan pada awal triwulan IV mencapai lebih dari 120% (yoy) karena meningkatnya proyek pembangunan pabrik seperti pada sektor industri kimia dasar dan besi/logam, pembangunan properti residensial maupun komersial oleh pihak swasta maupun untuk penyelesaian pembangunan infrastruktur oleh pemerintah. Perluasan pembangunan pengembangan kawasan hunian ke arah wilayah Banten terutama Tangerang dan Serang mendorong peningkatan investasi baik infrastruktur, kebutuhan pemukiman dan hunian bisnis lainnya, meskipun secara nasional, indeks tendensi bisnisnya menunjukkan sedikit penurunan.

Perekonomian Banten sebagian besar, sekitar **54,80%** PDRB Banten disumbangkan dari sektor sekunder (sektor industri pengolahan; sektor bangunan;sektor listrik, gas dan air bersih), kemudian sebesar **37,14%** dari sektor tersier (sektor perdagangan, hotel dan restoran;sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor keuangan,persewaan dan jasa perusahaan; sektor jasa-jasa). Sementara itu sebesar **8,06%** berasal dari sektor primer (sektor pertanian; sektor pertambangan dan penggalian).

Struktur investasi banten sampai saat ini dibentuk dari Sektor Swasata dan Rumah Tangga, yang terdiri dari sumabngan sektor UMKM-K sebesar 48,78%, sedangkan sektor pemerintah terdiri dari APBN 8,01, APBD provinsi Banten 3,34%, dan APBD Kab/Kota 7,35%. Perkembangan struktur investasi di Banten terlihat sebagaimana Gambar 3.6.



Sumber : Analisis I-O, BPS Banten 2000

**3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2013**

## **1. Tantangan Perekonomian Tahun 2013**

Kondisi ekonomi makro tahun 2011 dan perkiraan pada tahun 2012 lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kemajuan tersebut antara lain ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan stabilitas yang terjaga.

Perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 6,5% tahun 2011 lebih tinggi dari tahun 2010 (6,2%). Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2011 terutama ditopang oleh ketahanan domestik berupa investasi yang meningkat dan daya beli masyarakat yang terjaga serta ekspor barang dan jasa yang tetap tumbuh.

Stabilitas ekonomi Indonesia pada tahun 2011 masih terjaga dalam menghadapi tekanan berat ekonomi dunia berupa melambatnya perekonomian dunia, berlanjutnya krisis keuangan Eropa, gangguan cuaca dan iklim, serta ketegangan politik di Timur Tengah, Iran, Suriah.

Dalam pada itu, berbagai hambatan di dalam negeri yang belum terselesaikan serta kemungkinan cuaca ekstrem di dalam negeri akan dihadapi dengan berbagai langkah yang tepat. Secara keseluruhan momentum pembangunan yang sudah dicapai pada tahun 2011 dapat dipertahankan pada tahun 2012, dan dapat ditingkatkan pada tahun 2013.

Dengan kemajuan yang dicapai pada tahun 2011 dan masalah yang diperkirakan masih dihadapi hingga tahun 2012, tantangan pokok yang dihadapi pada Tahun 2013 adalah sebagai berikut :

- a. Mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, dorongan akan diberikan pada peningkatan investasi, industri pengolahan nonmigas, daya saing ekspor, penguatan penyerapan belanja negara, serta pemantapan ketahanan pangan dan energi.
- b. Menjaga stabilitas ekonomi, perhatian akan diberikan pada langkah-langkah yang terpadu untuk menjaga stabilitas harga di dalam negeri dan nilai tukar dihadapkan pada tingginya resiko harga komoditi baik migas maupun non-migas serta arus modal yang dapat membahayakan perekonomian.
- c. Mempercepat pengurangan pengangguran dan kemiskinan, langkah-langkah akan dipusatkan pada upaya-upaya yang mampu menciptakan lapangan kerja yang lebih besar serta menjangkau

masyarakat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan dengan program-program pemberdayaan yang tepat.

Pertumbuhan ekonomi didorong dengan meningkatkan investasi, menjaga ekspor nonmigas, serta memberi dorongan fiskal dalam batas kemampuan keuangan negara dengan mempertajam belanja negara.Koordinasi antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil, ditingkatkan untuk mendorong peran masyarakat dalam pembangunan ekonomi. Dalam tahun 2013, perekonomian diperkirakan tumbuh sebesar 7,0%, lebih tinggi dibandingkan sasaran tahun 2012 (6,5%);

Dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, stabilitas ekonomi yang terjaga, serta berbagai kegiatan pembangunan yang diarahkan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan pengangguran, jumlah penduduk miskin dan pengangguran terbuka menurun. Pada tahun 2013 jumlah penduduk miskin menjadi berkisar antara 9,5 – 10,5%, dan pengangguran terbuka diperkirakan turun menjadi berkisar antara 6,0 – 6,4% dari angkatan kerja;

## 2. Proyeksi Perekonomian Daerah Tahun 2013

Dalam merumuskan prospek perekonomian daerah tahun 2013 mendatang, tentunya perlu memperhatikan perkembangan dan prospek ekonomi Indonesia Tahun 2013.Kondisi ekonomi Kawasan Asia-Pasifik saat ini mengeluarkan sinyal positif bagi perekonomian Nasional ditandai dengan *recovery* perekonomian Amerika yang terus membaik.Kondisi ekonomi makro Provinsi Banten dan Nasional pada tahun 2013 terlihat sebagaimana Tabel 3.3.

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Sasaran Ekonomi Makro Provinsi Banten dan Nasional Tahun 2013 (%)**

| NO | URAIAN INDIKATOR                | BANTEN  | NASIONAL |
|----|---------------------------------|---------|----------|
| 1  | Laju Pertumbuhan Ekonomi        | 6,5-6,7 | 6,8-7,2  |
| 2  | Porsentase Penduduk Miskin      | 5,5-5,2 | 9,5-10,5 |
| 3  | Porsentase Pengangguran Terbuka | 12,0    | 5,8-6,1  |

Sumber : RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017 dan RKP Tahun 2013

Berdasarkan analisis atas hasil evaluasi kinerja pembangunan yang telah dicapai, memperhatikan prospek perekonomian nasional, permasalahan yang dihadapi, maka tantangan pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dihadapi pada tahun 2013 adalah permasalahan yang dihadapi sektor industri dapat

dikelompokkan atas permasalahan yang ada dalam sektor itu sendiri (masalah internal) dan permasalahan yang berada diluar sektor industri (masalah eksternal). Permasalahan internal utamanya bersumber pada lemahnya postur dan jumlah populasi usaha industri manufaktur, lemahnya struktur industri, serta rendahnya produktivitas. Sedangkan masalah eksternal industri mencakup (a) ketersediaan dan kualitas infrastruktur dan energi (jaringan jalan/jembatan, transportasi, listrik, pasokan gas) yang belum memadai, (b) pengawasan barang-barang impor yang belum mampu menghentikan peredaran barang impor ilegal di pasar domestik, (c) hubungan industrial dalam perburuhan belum terbangun dengan baik (d) masalah kepastian hukum (e) suku bunga perbankan yang masih tinggi.

Pada tahun 2013, pembangunan perekonomian daerah Provinsi Banten diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan sekaligus pertumbuhan ekonomi agar mampu memecahkan permasalahan sosial mendasar terutama kemiskinan dan pengangguran. Oleh karena itu, diperlukan partisipasi aktif masyarakat dan swasta (dunia usaha) sebagai pilar dan pelaku utama pembangunan. Disamping itu pembangunan ekonomi daerah Provinsi Banten ditempuh untuk meningkatkan pemerataan dan sekaligus mendorong pengelolaan potensi pembangunan yang selama ini belum termanfaatkan secara optimal, antara lain pada sektor pertanian, sektor industri yang berbasis pertanian, industri rakyat dan pariwisata. Melalui upaya tersebut diharapkan mampu memberikan solusi bagi upaya pemecahan permasalahan sosial mendasar seperti kemiskinan dan pengangguran.

Dalam kaitan tersebut diatas, pertumbuhan ekonomi didorong terutama dengan meningkatkan investasi. Peningkatan investasi dilakukan dengan mengurangi hambatan-hambatan yang ada yaitu dengan menyederhanakan prosedur perijinan, mengurangi tumpang tindih kebijakan, meningkatkan kepastian hukum terhadap usaha, menyehatkan iklim ketenagakerjaan, meningkatkan penyediaan infrastruktur dan energi, menyederhanakan prosedur, dan lain-lain. Sistem insentif yang tepat sasaran bagi pengembangan bidang-bidang usaha dan daerah-daerah strategis dan cepat tumbuh akan terus dikembangkan dan disempurnakan.



Mengacu pada tantangan pokok perekonomian daerah, maka perekonomian daerah Provinsi Banten tahun 2013 dibangun dengan sasaran sebagai berikut ini :

- a. Faktor eksternal pengaruhnya masih sangat dominan, maka asumsi pokok untuk mencapai pertumbuhan dan kualitas ekonomi daerah yang tinggi, antara lain (a) Terjaga dan terkendalinya stabilitas keamanan; (b) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui investasi dunia usaha dan masyarakat, (c) Menjaga stabilitas Inflasi, (d) Jaminan kepastian hukum dan (e) Terjaga dan terkendalinya stabilitas moneter;
- b. Berkurangnya tingkat penduduk miskin dan pengangguran. Dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, stabilitas ekonomi yang terjaga, serta berbagai kegiatan pembangunan yang diarahkan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan pengangguran, jumlah penduduk miskin dan pengangguran terbuka menurun. Pada tahun 2013 jumlah penduduk miskin diperkirakan turun menjadi sekitar 5,5 – 5,1% dan pengangguran terbuka diperkirakan turun sebesar 12,0% dari angkatan kerja.
- c. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Berbagai langkah kebijakan untuk meningkatkan investasi dan tetap terjaganya kepercayaan masyarakat akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari sekitar 6,0 – 6,45% pada tahun 2012, menjadi 6,50 – 6,80% tahun 2013;
- d. Terpenuhinya kebutuhan anggaran pembangunan. Berdasarkan hasil perhitungan Analisis Input–Output serta kajian ICOR tahun 2009, dimana struktur investasi Provinsi Banten digambarkan sebagai berikut :
  - 1) Investasi Swasta-Masyarakat sebesar 81,30%, dengan sumbangan dari PMA dan PMDN sebesar 32,52% dan UMKM-K sebesar 48,78%;
  - 2) Investasi Pemerintah sebesar 18,70%. Investasi ini dikategorikan sebagai jumlah pengeluaran oleh pemerintah untuk menambah modal tetap yang dimiliki atau dengan kata lain investasi yang digunakan khusus untuk belanja pembangunan dan pelayanan publik. Investasi pemerintah tersebut merupakan sumbangan dari APBN sebesar 8,01%, APBD provinsi sebesar 3,34% dan APBD dari 8 kabupaten/kota sebesar 7,35%. Dengan pengertian bahwa alokasi dana tersebut digunakan untuk menciptakan peluang investasi baru melalui pendanaan prioritas dan program yang direkomendasikan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2013;



- 3) Berdasarkan struktur tersebut, maka pada tahun 2013, perkembangan PDRB yang semakin bertambah rata-rata sebesar Rp. 15,7 trilyun per tahun sehingga diharapkan dapat merealisasikan LPE Banten yang diasumsikan sebesar 6,50 – 6,80% pada tahun 2013;
- 4) Investasi tersebut diharapkan dari dunia usaha dan masyarakat melalui target realisasi investasi PMDN dan PMA sebesar Rp. 14,9 Trilyun, target realisasi investasi oleh Anggaran Belanja Langsung dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp. 2,097trilyun, didukung APBD kabupaten/kota dan APBN.

## **3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH**

### **3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan**

Dalam merumuskan arah kebijakan keuangan daerah mendatang, perlu juga memperhatikan pokok-pokok kebijakan dan asumsi keuangan nasional tahun 2013, yaitu:

1. Mendukung pertumbuhan perekonomian nasional dengan melanjutkan program-program stimulus fiskal guna mencapai target asumsi ekonomi makro nasional tahun 2013, antar lain :
  - a. Defisit APBN 2013 diperkirakan sebesar 1,0% PDB;
  - b. Pertumbuhan Ekonomi Nasional diproyeksikan sebesar 7,0%;
  - c. Inflasi pada angka 5,0%;
  - d. Pengangguran terbuka 6,0-6,4%;
  - e. Penduduk miskin 9,5-10,5%.
2. Belanja negara diperkirakan mencapai Rp1.400 triliun sampai Rp1.600 triliun, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar 10,7% terhadap PDB dan transfer ke daerah sebesar 5,2% terhadap PDB;
3. Mempertahankan stimulus Belanja Negara melalui peningkatan daya beli masyarakat dan program pembangunan padat karya;
4. Mempertahankan rasio anggaran untuk fungsi Pendidikan sebesar 20% dalam Belanja Negara.

Hasil analisis terhadap kondisi, tantangan dan prospek perekonomian baik ditingkat nasional maupun daerah menjadi pedoman dalam melakukan analisis dan proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan sebagaimana yang tergambar dalam Tabel 3.4 tentang struktur APBD TA. 2012 dan rancangan struktur APBD TA. 2013.

**Tabel 3.4**  
**Struktur APBD Provinsi Banten**  
**TA. 2012 dan Rancangan Struktur APBD TA. 2013**

| NO           | URAIAN                                                                             | APBD TA. 2012            | RAPBD TA. 2013           |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>1</b>     | <b>PENDAPATAN DAERAH</b>                                                           | <b>3,902,075,000,000</b> | <b>4,416,108,000,000</b> |
| <b>1.1</b>   | <b>Pendapatan Asli Daerah</b>                                                      | <b>2,981,553,000,000</b> | <b>3,379,795,000,000</b> |
| 1.1.1        | Pajak Daerah                                                                       | 2,841,335,000,000        | 3,264,228,000,000        |
| 1.1.2        | Retribusi Daerah                                                                   | 5,818,000,000            | 4,427,000,000            |
| 1.1.3        | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan                                  | 60,800,000,000           | 37,460,000,000           |
| 1.1.4        | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah                                          | 73,600,000,000           | 73,680,000,000           |
| <b>1.2</b>   | <b>Dana Perimbangan</b>                                                            | <b>916,372,000,000</b>   | <b>1,032,777,000,000</b> |
| 1.2.1        | Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak                                       | 355,852,000,000          | 448,861,000,000          |
| 1.2.2        | Dana Alokasi Umum                                                                  | 530,833,000,000          | 583,916,000,000          |
| 1.2.3        | Dana Alokasi Khusus                                                                | 29,687,000,000           |                          |
| <b>1.3</b>   | <b>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>                                        | <b>4,150,000,000</b>     | <b>3,536,000,000</b>     |
| 1.3.1        | Pendapatan Hibah                                                                   | 4,150,000,000            | 3,536,000,000            |
| <b>2</b>     | <b>BELANJA DAERAH</b>                                                              | <b>4,134,075,000,000</b> | <b>4,596,108,000,000</b> |
| <b>2.1</b>   | <b>Belanja Tidak Langsung</b>                                                      | <b>2,039,583,000,000</b> | <b>2,034,769,000,000</b> |
| 2.1.1        | Belanja Pegawai                                                                    | 367,476,000,000          | 423,857,000,000          |
| 2.1.2        | Belanja Hibah                                                                      | 289,420,000,000          | 223,700,000,000          |
| 2.1.3        | Belanja Bantuan Sosial                                                             | 28,750,000,000           | 70,000,000,000           |
| 2.1.4        | Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota                                           | 983,951,000,000          | 1,150,012,000,000        |
| 2.1.5        | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik | 364,986,000,000          | 157,200,000,000          |
| 2.1.6        | Belanja Tidak Terduga                                                              | 5,000,000,000            | 10,000,000,000           |
| <b>2.2</b>   | <b>Belanja Langsung</b>                                                            | <b>2,094,492,000,000</b> | <b>2,561,339,000,000</b> |
|              | <b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>                                                           | <b>(232,000,000,000)</b> | <b>(180,000,000,000)</b> |
| <b>3</b>     | <b>PEMBIAYAAN</b>                                                                  | <b>232,000,000,000</b>   | <b>180,000,000,000</b>   |
| <b>3.1</b>   | <b>Penerimaan Pembiayaan</b>                                                       | <b>264,000,000,000</b>   | <b>240,000,000,000</b>   |
| 3.1.1        | SiLPA Tahun Sebelumnya                                                             | 264,000,000,000          | 240,000,000,000          |
| <b>3.2</b>   | <b>Pengeluaran Pembiayaan</b>                                                      | <b>32,000,000,000</b>    | <b>60,000,000,000</b>    |
| <b>3.2.1</b> | <b>Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah:</b>                             | <b>32,000,000,000</b>    | <b>60,000,000,000</b>    |
| 3.2.1.1      | LPK/BPR                                                                            | 10,000,000,000           | 6,000,000,000            |
| 3.2.1.2      | PT. BGD                                                                            | 10,000,000,000           |                          |
| 3.2.1.3      | Bank BJB Syariah                                                                   | 12,000,000,000           | 28,000,000,000           |
| 3.2.1.4      | PT. PPKD                                                                           |                          | 26,000,000,000           |
| <b>3.3</b>   | <b>Pembiayaan Netto</b>                                                            | <b>232,000,000,000</b>   | <b>180,000,000,000</b>   |

### 3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Beberapa perubahan mendasar dalam sistem perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah menuntut dilakukannya

sejumlah perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam aspek anggaran, aspek akuntansi, dan aspek pemeriksaan. Perubahan-perubahan ini mengarahkan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang diimplementasikan dalam sistem anggaran berbasis kinerja.

Penganggaran daerah yang didasarkan kepada kemampuan keuangan daerah diarahkan dan dikelola berazaskan fungsi : (1) Otorisasi, yaitu sebagai dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan; (2) Perencanaan, yaitu menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan; (3) Pengawasan, yaitu menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan; (4) Fungsi Alokasi, yaitu anggaran daerah yang harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian; (5) Fungsi Distribusi, yaitu kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; dan (6) Stabilisasi, yaitu menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang direncanakan perlu mempedomani norma dan prinsip anggaran sebagai berikut :

1. **Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Daerah.** Merupakan persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan tanggungjawab. Sebagai instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam mensejahterakan rakyat, maka APBD dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan;
2. **Disiplin Anggaran.** Program harus disusun dengan berorientasi pada kebutuhan masyarakat tanpa meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan;

3. **Keadilan Anggaran Pendapatan**, pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang dipikul oleh segenap lapisan masyarakat. Untuk itu Pemerintah mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan yang obyektif agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan;
4. **Efisiensi dan Efektivitas Anggaran**. Dana yang tersedia dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal guna kepentingan masyarakat. Oleh karena itu untuk mengendalikan tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran, maka dalam perencanaannya ditetapkan secara jelas arah dan tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang diprogramkan.

Arah kebijakan keuangan daerah memuat tentang arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah, dan arah kebijakan pembiayaan daerah.

### **1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah**

Arah kebijakan pendapatan daerah meliputi asumsi target penerimaan pendapatan daerah, pertimbangan dalam penentuan kebijakan pendapatan daerah, target pendapatan daerah dan upaya pencapaian target pendapatan daerah.

#### **a. Asumsi Target Penerimaan Pendapatan Daerah**

Asumsi target penerimaan pendapatan daerah adalah sebagai berikut :

##### **1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Penerimaan PAD pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2012-2017 diproyeksikan rata-rata sebesar 13,25% per tahun, dengan mempertimbangkan asumsi-asumsi berikut :

- a) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) berkisar 6-7%;
- b) Realisasi penerimaan PAD selama kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 22,96% per tahun, namun rata-rata realisasi PAD dari target setiap tahun sebesar 8,34%;

- c) Pajak cukai rokok akan menjadi komponen pajak daerah pada tahun 2014 dengan proyeksi pendapatan rata-rata sebesar 22,96% per tahun;
- d) Prediksi produksi kendaraan bermotor secara nasional tahun 2012 sebanyak 780.000 unit dan tumbuh setiap tahun hingga tahun 2015 sebanyak 1.300.000 unit. Sedangkan jumlah yang dipasarkan di wilayah Provinsi Banten setiap tahun rata-rata sebesar 4,7% ;
- e) Kebijakan peningkatan penyertaan modal kepada lembaga-lembaga keuangan bank dan PT. Banten Global Development;
- f) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/10/DPNP perihal Penerapan Manajemen Resiko pada Bank yang melakukan Pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB);
- g) Rencana penerapan pajak progresif di Provinsi Banten pada tahun 2014, berpengaruh terhadap kepemilikan kendaraan baru.

## 2) Dana Perimbangan

Penerimaan dari dana perimbangan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2012-2017 diproyeksikan sebesar 7-8% per tahun, dengan mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut :

- a) Realisasi penerimaan Dana Perimbangan selama kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami peningkatan rata-rata sebesar 8,77%;
- b) Berkurangnya pos dana perimbangan dari Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan mulai tahun 2014.

## 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2012-2017 diproyeksikan rata-rata sebesar 0,01% per tahun.

## **b. Pertimbangan dalam Penentuan Kebijakan Pendapatan Daerah**

Beberapa pertimbangan dalam penentuan kebijakan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut :

### **1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Dalam upaya pengelolaan dan peningkatan PAD, kebijakan yang ditempuh adalah memberikan insentif untuk menarik atau merangsang agar kegiatan ekonomi masyarakat cenderung dapat meningkat. Upaya tersebut antara lain melalui (a) penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, (b) rasionalisasi pajak/retribusi daerah, (c) meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah, serta (d) meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas , kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan.

Sejalan dengan arah kebijakan penganggaran khususnya kebijakan pendapatan, tantangan pokok yang dihadapi berkaitan dengan upaya untuk terus meningkatkan PAD melalui pajak dan non pajak daerah guna membiayai prioritas pembangunan yang ditetapkan.

Secara umum kebijakan penganggaran daerah adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam meningkatkan target-target pendapatan dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengefektifkan belanja, dan efisiensi pembiayaan.

Untuk penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD dalam penyusunan APBD TA. 2013 memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a) Kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2012 dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;
- b) Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dilarang menganggarkan penerimaan pajak daerah dan retribusi

daerah yang Peraturan Daerahnya bertentangan dengan Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan/atau telah dibatalkan;

- c) Kebijakan penganggaran tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha;
- d) Rasionalitas hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atas penyertaan modal atau investasi daerah lainnya, dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan, baik dalam bentuk uang maupun barang sebagai penyertaan modal (investasi daerah).

## 2) Dana Perimbangan

Untuk penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2013, memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Perhitungan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) didasarkan pada alokasi DAU TA. 2012 dengan memperhatikan realisasi TA. 2011;
- b) Perhitungan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) mempertimbangkan besaran alokasi DBH yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan TA. 2012, dan memperhatikan realisasi DBH TA. 2011;
- c) Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat dianggarkan sebagai pendapatan daerah, sepanjang telah ditetapkan dalam APBN TA. 2013.

## 3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Untuk penganggaran pendapatan yang bersumber dari dana Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam APBD TA. 2013, hal yang perlu diperhatikan adalah Penetapan target penerimaan hibah yang bersumber dari sumbangan pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah TA.2013 yang akan dilakukan adalah:

- a) Pengembangan sistem administrasi, meningkatkan kualitas pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
- b) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah dengan berpegang kepada prinsip keadilan dan tidak memberatkan masyarakat;
- c) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam bidang pajak daerah;
- d) Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
- e) Penataan bidang perencanaan, pelaporan dan evaluasi pendapatan;

### **c. Target Pendapatan Daerah**

Target Pendapatan Daerah pada tahun 2013 ditargetkan sebesar Rp.4.416.108.000.000,-meliputi(1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, (2) Dana Perimbangan yang terdiri dari : Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

#### **1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2013 ditargetkan sebesar Rp 3.379.795.000.000,-. Jumlah PAD tersebut diperoleh dari :

- a) Pajak Daerah ditargetkan sebesar Rp 3.264.228.000.000,-;
- b) Retribusi Daerah ditargetkan sebesar Rp 4.427.000.000,-;
- c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yang ditargetkan sebesar Rp 37.460.000.000,-; dan
- d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yang ditargetkan sebesar Rp. 73.680.000.000,-.

#### **2) Dana Perimbangan**

Dana Perimbangan yang ditargetkan dalam tahun 2013 adalah sebesar Rp. 1.032.777.000.000,-. Dana Perimbangan tersebut diperoleh dari :



- a) Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak yang ditargetkan sebesar Rp. 448.861.000.000,-;
  - b) Dana Alokasi Umum yang ditargetkan sebesar Rp. 583.916.000.000,00;;
  - c) Dana Alokasi Khusus tidak ditargetkan.
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang ditargetkan dalam tahun 2013 adalah sebesar Rp. 3.536.000.000,- Jumlah dana tersebut diperoleh dari Pendapatan Hibah Pihak Ketiga sebesar Rp. 3.536.000.000,-

Secara lengkap target pendapatan daerah Provinsi Banten TA.2013 terlihat sebagaimana Tabel 4.1.

**Tabel 3.5**  
**Target Pendapatan Daerah Provinsi Banten**  
**Tahun Anggaran 2013**

| NO         | URAIAN                                            | APBD TA. 2012            | RAPBD TA. 2013           |
|------------|---------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>1</b>   | <b>PENDAPATAN DAERAH</b>                          | <b>3,902,075,000,000</b> | <b>4,416,108,000,000</b> |
| <b>1.1</b> | <b>Pendapatan Asli Daerah</b>                     | <b>2,981,553,000,000</b> | <b>3,379,795,000,000</b> |
| 1.1.1      | Pajak Daerah                                      | 2,841,335,000,000        | 3,264,228,000,000        |
| 1.1.2      | Retribusi Daerah                                  | 5,818,000,000            | 4,427,000,000            |
| 1.1.3      | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 60,800,000,000           | 37,460,000,000           |
| 1.1.4      | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah         | 73,600,000,000           | 73,680,000,000           |
| <b>1.2</b> | <b>Dana Perimbangan</b>                           | <b>916,372,000,000</b>   | <b>1,032,777,000,000</b> |
| 1.2.1      | Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak      | 355,852,000,000          | 448,861,000,000          |
| 1.2.2      | Dana Alokasi Umum                                 | 530,833,000,000          | 583,916,000,000          |
| 1.2.3      | Dana Alokasi Khusus                               | 29,687,000,000           |                          |
| <b>1.3</b> | <b>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>       | <b>4,150,000,000</b>     | <b>3,536,000,000</b>     |
| 1.3.1      | Pendapatan Hibah                                  | 4,150,000,000            | 3,536,000,000            |

Sumber : DPKAD Provinsi Banten Tahun 2012

**d. Upaya Pencapaian Target Pendapatan Daerah**

Upaya-upaya yang akan dilakukan Pemerintah Provinsi Banten dalam pencapaian target pendapatan daerah tahun 2013 sebagai berikut :

- 1) Peningkatansarana dan prasarana,melalui:
  - a) Rehabilitasi/renovasi bangunan gedung UPT yang representatif;
  - b) Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung di setiap UPT.
- 2) Peningkatan sumberdaya manusia, melalui:
  - a) Bimbingan Teknis Peningkatan Kemampuan Pelayanan Aparatur;
  - b) Pelatihan Penerapan Sistem Aplikasi Samsat.
- 3) Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, melalui:
  - a) Razia kendaraan bermotor;
  - b) SAMSAT door to door;
  - c) Sosialisasi pajak daerah melalui media cetak dan media elektronik;
  - d) Penyuluhan pajak daerah di kecamatan-kecamatan;
  - e) Koordinasi dengan instansi teknis terkait (SKPD penghasil, pertamina, produsen kendaraan bermotor, lembaga pembiayaan/leasing, kepolisian, dan jasa raharja).
- 4) Peningkatan pelayanan pada UPT/Kantor Bersama Samsat, melalui:
  - a) Penambahan jumlah UPT/Kantor Bersama SAMSAT;
  - b) SAMSAT keliling;
  - c) Pembentukan gerai SAMSAT;
  - d) Pembentukan SAMSAT drive thru;
  - e) Sertifikasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2002-2008, di seluruh UPT/Kantor Bersama SAMSAT;
  - f) Layanan informasi pajak kendaraan bermotor melalui SMS (Short Message Services) dengan *provider*.
- 5) Peningkatan Sistem,melalui:
  - g) Pembentukan sistem SAMSAT online;
  - h) Pembentukan dan maintenance sistem aplikasi SAMSAT;
  - i) Pembentukan sistem informasi pajak daerah.

## 2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, oleh karena itu dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2013, Pemerintah Provinsi Banten berupaya menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Disamping itu, program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya..

Penerapan azas efisiensi dan efektifitas belanja merupakan langkah – langkah yang ditempuh dalam mengoptimalkan belanja daerah. **Total Belanja Daerah dalam APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 ditargetkan sebesar Rp. 4,596Trilyun.**

Disamping itu adanya penyesuaian gaji dan tunjangan yang melekat sebesar 10% dari tahun sebelumnya serta penyesuaian tambahan penghasilan pegawai negeri sipil berdasarkan beban kerja dan pertimbangan efektif lainnya, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### a. Kebijakan Belanja Tidak Langsung

Kebijakan Belanja Tidak Langsung dalam Rancangan APBD Provinsi Banten TA. 2013 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

#### 1) Belanja Pegawai

- a) Besarnya penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai dan belanja pegawai dalam rangka perhitungan DAU Tahun Anggaran 2013 dengan memperhitungkan rencana kenaikan

gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas.

- b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD sesuai formasi pegawai tahun 2013.
- c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- d) Penganggaran tambahan penghasilan PNSD, baik aspek kebijakan pemberian tambahan penghasilan maupun penentuan kriterianya harus ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan kepala daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

## 2) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Penganggaran belanja hibah yang diberikan Pemerintah Provinsi Banten kepada pemerintah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan ditujukan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Sedangkan penganggaran belanja bantuan sosial yang diberikan kepada individu, keluarga, masyarakat, dan kelompok masyarakat diarahkan untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

## 3) Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota

Penganggaran dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tata cara penganggaran dana bagi hasil tersebut telah memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah pada Tahun Anggaran 2013, sedangkan pelampauan target Tahun

Anggaran 2012 yang belum direalisasikan kepada pemerintah daerah dan menjadi hak pemerintah kabupaten/kota atau pemerintah desa ditampung dalam Perubahan APBD TA. 2013.

4) Belanja Bantuan Keuangan.

Penganggaran bantuan keuangan kepada pemerintah daerah lainnya dan kepada desa yang didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya, sesuai kemampuan keuangan masing-masing daerah. Belanja Bantuan Keuangan diberikan kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota, Pemerintah Desa, dan Partai Politik.

5) Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi TA. 2011 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada TA. 2013, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

**b. Kebijakan Belanja Langsung**

Belanja langsung yang merupakan belanja program dan kegiatan pembangunan digunakan untuk membiayai pembangunan tahun 2013 dengan mendasarkan pada :

- 1) Kewenangan pada tingkat pemerintahan;
- 2) Tugas pokok dan fungsi SKPD;
- 3) Evaluasi kinerja SKPD tahun sebelumnya;
- 4) Capaian target *Pro job, Pro poor, Pro growth, Pro enviromental*, dan *MDG's*;
- 5) Aspirasi masyarakat yang mendesak untuk ditangani;
- 6) Sinkronisasi perencanaan program dan penganggaran pusat-daerah.

### **c. Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Alokasi belanja langsung dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Pemerintahan Provinsi Banten pada tahun 2013 akan melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan, sebagaimana yang telah tertuang dalam RKPD Provinsi Banten Tahun 2013. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah, berkaitan dengan pelayanan dasar, terdiri dari 25 (dua puluh lima) urusan pemerintahan yang meliputi :

- 1) Pendidikan;
- 2) Kesehatan;
- 3) Lingkungan hidup;
- 4) Pekerjaan umum;
- 5) Penataan ruang;
- 6) Perencanaan pembangunan;
- 7) Perumahan;
- 8) Kepemudaan dan olahraga;
- 9) Penanaman modal;
- 10) Koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- 11) Kependudukan dan catatan sipil;
- 12) Ketenagakerjaan;
- 13) Ketahanan pangan;
- 14) Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 15) Keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- 16) Perhubungan;
- 17) Komunikasi dan informatika;
- 18) Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- 19) Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;

- 20) Pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 21) Sosial;
- 22) kebudayaan;
- 23) Statistik;
- 24) Kearsipan
- 25) Perpustakaan.

Urusan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah, terdiri dari 8 (delapan) bidang urusan pemerintahan meliputi :

- 1) Kelautan dan perikanan;
- 2) Pertanian;
- 3) Kehutanan;
- 4) Energi dan sumber daya mineral;
- 5) Pariwisata;
- 6) Industri;
- 7) Perdagangan;
- 8) Ketransmigrasian.

### **3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dijelaskan bahwa pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan / atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Fungsi pembiayaan merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara yang mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggung jawaban, sebagai perwujudan dari APBD.

Di dalam pengelolaan keuangan daerah dan khususnya yang berkaitan dengan fungsi otorisasi bahwa anggaran daerah yang merupakan bagian dari anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Oleh karena itu, berkaitan dengan kebijakan penganggaran daerah tahun 2013 mengupayakan adanya anggaran berimbang dengan menempatkan Sisa

Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebagai alat untuk menutupi defisit, namun estimasi sisa lebih perhitungan tahun anggaran tersebut belum dapat dihitung secara definitif karena kegiatan masih berjalan dan perhitungannya dilakukan pada akhir tahun anggaran.

#### **a. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan**

Penerimaan Pembiayaan dalam Rancangan APBD Provinsi Banten TA. 2013 bersumber dari penganggaran(SiLPA) tahun sebelumnya sebesar Rp. 240.000.000.000. Penganggaran tersebut harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2012 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada TA.2013 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

#### **b. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan**

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan dalam Rancangan APBD Provinsi Banten TA. 2013 sebagai berikut :

- 1) Penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang.
- 2) Meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Masyarakat Kecil dan Menengah (UMKM), melalui penyertaan modal kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR)/LPK.

Proyeksi neraca APBD yang ditargetkan dalam tahun 2013 menggambarkan bahwa Total Pendapatan Daerah sebesar Rp.4.416.108.000.000,-, sedangkan Total Belanja Daerah sebesar Rp.4.596.108.000.000,-, mengalami defisit sebesar Rp.180.000.000.000,-, sehingga masih perlu diupayakan sumber-sumber pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut dengan mempertimbangkan SiLPA tahun lalu dan kemampuan pembiayaan daerah dari pos-pos penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 240.000.000.000,-.

Disamping itu di Tahun 2013 mendatang dianggarkan untuk pengeluaran pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal (investasi)



pemerintah daerah sebesar Rp.60.000.000.000.Keseluruhan penyerataan modal tersebut merupakan penyertaan modal untuk menutupi sisa penyertaan modal yang telah dibayarkan di tahun sebelumnya.